

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 SIMPULAN

Dari uraian pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan sebuah usaha yang sangat bermanfaat bagi manusia dalam segala hal, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya, meski tidak menutup kemungkinan akan ada dampak dan konsekuensi tertentu yang harus ditimbulkan. Namun tidak jarang yang kita lihat juga dampak dari sebuah pembangunan di satu pihak memberikan keuntungan namun di pihak lain justru memberikan dampak yang merugikan, demikian juga halnya masalah pembangunan Bendungan Pandandure ini di satu pihak memberikan manfaat namun di pihak lain menjadi sumber masalah karena adanya sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan akses dan manfaat dari bendungan tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat, yang pada ujungnya terjadi konflik vertikal dari pembangunan itu sendiri, yang semua itu bermula pada persoalan dasarnya dari kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

1. Dalam implementasi dari pembangunan Bendungan Pandandure peran pemerintah sangat dominan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, seluruh keputusan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur diklaim sebagai upaya dalam mensejahterakan rakyat agar masalah kekeringan dapat teratasi secara menyeluruh, akan tetapi dalam kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat tersebut merasa dimarjinalkan yang pada implikasinya menimbulkan konflik vertikal.

Terjadinya gejala konflik ini tidak lepas dari persoalan tidak berpihaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pembangunan Bendungan Pandandure sehingga terdapatnya sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung bahkan hanya menjadi peneonton di daerahnya sendiri, persoalan ini tidak lain akibat dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Lombok Timur dalam membangun bendungan yang tidak memperhatikan masyarakat secara menyeluruh lebih-lebih masyarakat di dalam wilayah sekitar pembangunan tersebut, masyarakat Kecamatan Sakra seakan hanya dijadikan obyek pembangunan bukan sebagai subyek, hal ini terlihat setelah beroprasinya bendungan tersebut.

2. Konflik yang terjadi bukan hanya pada tataran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi berdampak pula kejajaran pemerintah daerah di bawahnya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di atasnya, mau tidak mau terpaksa pemerintah di bawah harus lebih banyak menghadapi permasalahan tersebut yang seyogyanya merekalah yang paling dekat dan paling sering berhadapan dengan masyarakat, sehingga setiap persoalan yang timbul sudah barang tentu lebih banyak dan lebih sering dihadapi oleh mereka yang ada di bawah.

Persoalan terjadinya konflik ini nampak pada beberapa tindakan yang diambil oleh masyarakat petani Kecamatan Sakra untuk menunjukkan ketidakpuasan atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pembangunan Bendungan Pandandure yang dalam hal ini tuntutan atas tidak adanya akses bendungan ke lahan pertanian mereka, adapun tindakannya ialah dengan mengadakan demo massa dan menutup pintu air serta tindakan lain seperti terjadinya percekocokan dengan pihak pengairan, terutama petugas pengairan.

3. Terjadinya konflik ini berdampak pada timbulnya beberapa persoalan, diantaranya masyarakat tidak mau membayar pesangon kepada petugas pengairan, timbulnya rasa apatis terhadap persoalan-persoalan kegiatan gotong royong maupun kegiatan lainnya yang bersifat kemasyarakatan untuk kepentingan umum dalam pembangunan daerah, serta timbulnya rasa anti pati terhadap Pemerintah Kabupaten, namun disisi lain menimbulkan juga rasa solidaritas yang tinggi dalam kekompakan untuk menuntut Pemerintah Kabupaten.
4. Permasalahan ini telah membuat upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam mengkondisikan gejala konflik yang terjadi, seperti

halnya dari Pemerintah Kabupaten, Camat, pihak pengairan, termasuk dari dalam masyarakat itu sendiri seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat turun serta berupaya mereda konflik yang terjadi, selain itu dari pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri langkah kongkrit yang terlihat ialah dengan memberikan bantuan kepada yang mengalami gagal panen sejumlah uang delapan juta rupiah dan bagi yang mengalami gagal tanam diberikan sejumlah enam juta ribu rupiah, yang kesemuanya itu dilakukan untuk berupaya mengatasi konflik tersebut guna menciptakan kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Adapun implikasi hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari dinamika konflik yang harus di hadapi.

1. Konflik yang terjadi ini merupakan bentuk tuntutan petani pada persoalan kebutuhan yang tidak diberikan secara merata oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada semua masyarakat yang sejak awal perencanaan pembangunan Bendungan Pandandure ini sudah ikut memperjuangkan agar tercapainya pembangunan tersebut. Permasalahan tidak ada akses bendungan ke lahan pertanian masyarakat Kecamatan Sakra ini tidak lepas dari kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam pembangunan bendungan tersebut, sehingga persoalan ini menimbulkan konflik antara masyarakat petani Kecamatan Sakra dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
2. Konflik yang terjadi ini bisa di ketahui dengan terjadinya demo masa, dan penutupan pintu air. Selain itu juga sering terjadi percekocokan antara petugas pengairan dengan petani, serta sering terdengar ucapan-ucapan kekesalan seperti sumpah serapah.
3. Konflik ini juga berdampak pada jajaran pemerintah di bawahnya, seperti permasalahan yang ditimbulkan yaitu masyarakat enggan membayar pesangon kepada petugas pengairan. Selain permasalahan

itu, juga berdampak pada persoalan keengganan masyarakat dalam beberapa kegiatan gotong royong dalam pemeliharaan dan menjaga saluran irigasi yang ada.

4. Untuk mengatasi konflik ini, dibutuhkan upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten dengan memberikan bantuan uang tunai kepada petani yang mengalami gagal tanam maupun gagal panen, maupun upaya dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan melakukan pendekatan untuk mengajak dan menghimbau agar masyarakat bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan melihat permasalahan ini perlu mendapat perhatian yang serius guna menciptakan kondisi hubungan pemerintah dengan masyarakatnya berjalan sesuai dengan asas keadilan dalam kesejahteraan, oleh sebab itu disarankan seharusnya bagi

1. Pemerintah.

Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur seharusnya perlu meningkatkan kinerja yang lebih proporsional dalam menentukan arah dan tujuan dalam mengeluarkan kebijakan sehingga dalam implementasinya di lapangan sejalan dengan hakikat tujuan dalam mensejahterakan masyarakat, selain itu diharapkan dalam setiap agenda pembangunan mengedepankan transparansi dalam berbagai hal yang memungkinkan bisa menimbulkan permasalahan.

2. Masyarakat.

Bagi masyarakat Kecamatan Sakra seharusnya benar-benar dan teguh dalam memperjuangkan hak-haknya, akan tetapi tetap dalam lingkup yang wajar jangan sampai melewati batas apalagi bertentangan dengan aturan serta norma dan nilai yang selama ini di pertahankan. Demikian halnya para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tetap menjaga dan mempertahankan apapun bentuk yang ideal dalam memperjuangkan kepentingan bersama entah itu pihak pemerintah maupun pihak masyarakat lainnya, harus dalam bingkai keutuhan dan kebersamaan.

3. Pemangku Kepentingan.

Dalam menjalankan kehidupan kita tidak bisa lepas dari beberapa aspek kebutuhan, akan tetapi hal itu bukanlah menjadi alasan untuk mencapainya dengan segala hal apalagi dengan cara yang tidak baik, karena itu dalam menjaga keutuhan dan kebersamaan perlu memperhatikan cara dan etika yang sewajarnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan secara sepihak

4. Khusus untuk pendidik sosiologi agar kiranya materi tentang konflik sosial yang terjadi di berbagai penjuru tanah air , sehingga di Kecamatan Sakra bisa memberikan wawasan dengan cara-cara untuk mengatasi konflik, sehingga konflik tidak terjadi lagi, hal itu dapat dilakukan dengan sikap dan perilaku yang dimulai dari guru yang menanamkan pemahaman antara guru dengan guru lainnya, guru dengan siswa, siswa dengan siswa lainnya.